



Kementerian PPN/  
Bappenas

# LAPORAN HASIL PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

SATKER - 658169

KPU KABUPATEN TABANAN

TAHUN ANGGARAN

# 2019

JULI

KOMISI PEMILIHAN UMUM

## REKAP KOMPONEN

Tahun Anggaran : 2019  
 Kementerian/Lembaga : 076 - KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 Unit Kerja Eselon I : 01 - Komisi Pemilihan Umum  
 Bulan : Juli (Parcial)

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI			Keterangan
					Berlaku	Anggaran	FISK	
				Rencana	Kinerja	Realisasi	Kinerja	
1	3364.052.001.051 Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	1	kegiatan	448.500.000	0	0.00 %	0	0.00 % Pelaksanaan Kegiatan : a. Mengikuti Pelaksanaan Konsolidasi Regional Program Partisipasi Masyarakat b. Melaksanakan kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pemilih berupa sosialisasi tahapan Pemilu terlema terkait tata cara pencoblosan dan tata cara pindah memilih c. melaksanakan lomba selfie di IPS untuk di-upload ke media dan KPU setempat dan lomba kreasi pentas seni Pemilih Pemula yang diselenggarakan dengan karakter budaya lokal (seni tariksen lukisan musik dsb). d. menggandakan alat peraga pernodikan pemilih untuk disebarkan ke masyarakat e. Kerjasama Lembaga LSM dan Ormas Dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Masyarakat f. Konser Musik "Pemilih Beraul Negara Kus" g. KPU Color Run Pemilu Serentak 2019 dengan target peserta mencapai 500 (lima ratus) orang
2	3364.050.001.051 Sosialisasi Penyelegaran Pemilu	1	kegiatan	123.498.000	0	0.00 %	0	0.00 % Pelaksanaan Kegiatan : a. Placement display di koran b. Sosialisasi luar ruang dengan Spanduk c. Placement iklan/talkshow di Radio d. Sosialisasi melalui tafap mukia
3	3364.049.001.051 Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelegaran Pemilu	1	kegiatan	59.000.000	0	0.00 %	0	0.00 % KPUPKP Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan supervisi ke tingkat Kecamatan dalam rangka pemantapan proses Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Suara keperluan Pemilu 2019.

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI			STATUS PELAKUANAKAN
					Realisasi	Konsekuensi	FISIK	
4	3364.047.001.051 Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD	1	Usporan	115.150.000	16.100.000	13.99 %	0	0.00 %
5	3364.043.001.051 Calon Anggota DPR, DPD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terseleksi Pemilu	16		1.450.000	0	0.00 %	0	0.00 %
6	3364.032.001.052 Pembentukan Rumah Pintar Pemilu	1		56.000.000	0	0.00 %	0	0.00 %
7	3364.030.001.052 Analisis Hasil Pengolahan Data dan Evaluasi Sistem Pemilu dan Pilkada	1		40.000.000	19.038.000	47.60 %	0	0.00 %
8	3364.006.001.051 Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemilu, Perempuan, dan Disabilitas	1		75.000.000	0	0.00 %	0	0.00 %
9	3364.005.001.051 Publikasi Informasi Pemilu	1		8.660.000	0	0.00 %	0	0.00 %

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI			KETERANGAN
					ANGGARAN	FISK	KINERJA	
				Realisasi	Kinerja	Kinerja	Total	Status
10	3364.004.001.051 Koordinasi PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1		1.500.000	0	0.00 %	0	0.00 % Belum dimulai/DIPA belum terbit
11	3364.003.001.051 Sosialisasi Penyelegaraan Pemilu	1		15.400.000	0	0.00 %	0	0.00 % Sesuai dengan PKPU 7 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tarifpan, Program, Dan Jadwal Penyelegaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. PAW Anggota DPRD Kabupaten/Tebahan rencanganya akan dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan Oktober 2019.
12	3364.001.001.051 Rancangan Pedoman Ijuknis Penyelegaraan Pemilu dan Pemilu kada	1		4.990.000	0	0.00 %	1	100.00 % Selesai sedang dilaksanakan kegiatan pelaksanaan bantuan hukum penyelesaian kasus hukum pemilu
13	3363.070.001.051 Bantuan hukum penyelesaian kasus hukum pemilu	1	kasus	106.280.000	40.665.200	38,26 %	0	0.00 % 19.13 % Pelaksanaan sedang dilaksanakan kegiatan pelaksanaan bantuan hukum penyelesaian kasus hukum pemilu
14	3363.019.001.051 Dana Kampanye Pemilu	1	Laporan	59.723.000	0	0.00 %	0	0.00 % Pelaksanaan Persiapan Penerimaan Laporan dan Audit Dana Kampanye Peserta pemilu
15	3363.018.001.051 Peraturan/Keputusan KPU Pemilu	1	Rancangan	3.984.000	0	0.00 %	0	0.00 % Pelaksanaan Mengikuti kegiatan rapat koordinasi dalam rangka penyuluhan evaluasi/FGD terkait peraturan KPU dan produk hukum terkait Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden atau evaluasi Pemilu
16	3363.010.001.051 Advokasi dan Bantuan Hukum	1		3.500.000	0	0.00 %	0	0.00 % Pelaksanaan Masih dalam Proses Advokasi dan Sengketa Hukum

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN			REALISASI			Status	Keterangan
					Realisasi	Kinerja	FISK	Realisasi	Kinerja	KINERJA TOTAL		
17	3361.005.001.051 Reviu Laporan Keuangan KPU Seusai Standar Akuntansi Pemerintah	1		.38.552.000	1.325.000	3.44 %	0	0.00 %	1.72 %	Pelaksanaan	Tahapan Pelaksanaan Kegiatan : a. Mengumpulkan data dan informasi mengenai proses penyusunan Laporan Keuangan. b. Mengumpulkan data dan informasi mengenai dharma' Barang Milik Negara. c. Mengunggulkan data dan informasi mengenai Laporan Realasi Anggaran, Nieraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Akis Laporan Keuangan (CAUK). d. Melakukan Koordinasi dengan KPU dan narasumber BPKP Perwakilan/Kanwil DJPBKPPN. e. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan Rapat sebagaimana telah ditetapkan. f. Melakukan review atas Laporan Keuangan. g. Membuat Laporan Hasil Kegiatan.	
18	3361.004.001.051 Evaluasi LAKIP	1		9.315.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Pelaksanaan	Tahapan Pelaksanaan Kegiatan : a. Menyusun Dokumen Rencra. b. Menyusun Dokumen Rencana Kerja Tahunan. c. Menyusun LAKIP. d. Melakukan Koordinasi dengan KPU dan instansi terkait lainnya. e. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan. f. Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai data dukung pengisian kerjas kerja evaluasi SAKIP. g. Menyusun dan menetapkan Laporan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan KPU.	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI			STATUS PELAKUKANAN
					ANGGARAN	RISIKO	KINERJA	
				Realisasi	Kontra	Realisasi	Kinerja	Keterangan:
19	<b>3360.994.001.002</b> Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12		646.246.000	45.410.780	7.03 %	1	8.33 %
								Alokasi anggaran untuk operasional kantor Kabupaten/Kota Tahun 2019 untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari perkantoran. Untuk memenuhi belanja pengiriman surat/jasa pengiriman, barangangsih Isarik, langganan telepon dan langganan air. Digunakan untuk pemenuhan pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan dan mesin, Untuk memenuhi belanja Pakaiain dinas, pegawai, pakaiain satuan, pramubat, pengemudi dan petugas kebersihan. Untuk memenuhi honor kusus Pengguna anggaran, honor pejabat pembuat komitmen, pejabat PSPN, honor bendahara pengeluaran, honor staf pengelola keuangan, Honor pejabat pengadaan dan panitia hasil pekerjaan banjir dan jasa, panitia penerima hasil pekerjaan dinas dalam rangka rapat/kordinasi ke KPBN.
20	<b>3360.024.001.053</b> Penyusunan BMN Logistik Pemilu	1	Dokumen	10.950.000	0	0.00 %	1	100.00 %
								Pelaksanaan Kegiatan - Melakukan Pencaataan Barang Logistik termasuk Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu Serentak Tahun 2019 yang Akhir Belanja 521.811,- ke dalam Anggaran Persediaan mulai logistik yang diterima dari pengadaan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
21	<b>3360.023.001.051</b> Fasilitasi keamanan Pemilu	12	layanan	19.860.000	0	0.00 %	1	8.33 %
								Pelaksanaan Kegiatan a. Meningkatkan kerjasama dengan Instansi terkait dalam bidang pengamanan gedung kantor KPU. b. Melaksanakan rapat koordinasi mengenai tahapan persiapan pengamanan dan pelaksanaan yang efektif, dan efisien. c. Melaksanakan penugasan bersama dengan instansi terkait dalam pengamanan gedung KPU, pengamanan kegiatan KPU, dan pengamanan aktif unjuk rasa. d. Mengevaluasi Kegiatan pengamanan yang sudah dilaksanakan, agar ke depan pelaksanaan kegiatan lebih baik.

NO	NOMER KELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI				KETERANGAN
					ANGGARAN	FISIK	KINERJA	KIRERIA TOTAL	
				Realisasi	Kinerja	Realisasi	Kinergia	Status	STATUS PELAKUAN
22	3360.010.001.051 Pengelolaan Barang Milik Negara	1	Dokumen	37.266.000	1.130.000	3.03 %	0	0.00 %	Pelaksanaan
									Melakukan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mulai dari kegiatan Penyusunan Perencanaan (RKBMN), Penetapan/Perbaikan BMN (Pencatatan pada aplikasi Presediaan dan SIMAK BMN), Penetapan Status Penggunaan BMN (PSBMN), sampai melakukah rekonsiliasi ke Kantor Pelajaran Kekayaan Negara dan Lelang (KPKLN).
23	3360.009.001.051 Pengelolaan Barang Milik Negara	1		4.508.000	0	0.00 %	0	0.00 %	Pelaksanaan
									Melakukan stock opname atau perhitungan fisik barang persediaan, baik persediaan rutin maupun persediaan barang logistik Pemilih Serentak Tahun 2019 yang masih bersimpan di gudang atau tempat penyimpanan. Stock Opname dilakukan 2 (dua) kali kegiatan tiap semester setiap tahunnya.
24	3357.041.001.051 Fasilitasi Panitia Pemungutan Suara (PPS)	1		910.385.000	0	0.00 %	0	0.00 %	Selesai
									Kebaktian ini dilakukan untuk menampung pembayaran kegiatan yang telah dibayar dan sebelum adanya penyederhanaan keluaran (output) 3357.046 Badan Pelayanan Garansi Adhoc Pemilih
25	3357.040.001.051 Fasilitasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	1		147.255.000	0	0.00 %	0	0.00 %	Selesai
									Tahapan pelaksanaan a. Melakukan koordinasi antara KPU Provinsi/KP Aceh, KPU/KP Kabupaten/Kota, dan Dinas Kependidikan dan Pendidikan Supil (Disdikcapil) setempat. b. Menghadiri rapat koordinasi terkait pemutakhiran DPLB dan DPK serta penggunaan aplikasi Sjaldin. c. Melakukan monitoring pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, di tingkat Kabupaten/kota maupun pada Badan Pelayanan Garansi Pemilih Ad Hoc.

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI			KETERANGAN
					ANGGARAN	FISK	KINERJA TOTAL	
26	3357.034.001.051 Pemutakhiran data Pemilih	1	dokumen	335.905.000	7.500.000	2.23 %	0	Tahapan pelaksanaan a. Melakukan koordinasi antara KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan Dinas Kependidikan dan Pengembangan Sipil (Disdukcapil) sejempat, b. Menghadiri rapat koordinasi terkait pemutakhiran data pemilih Pemilu antara KPU Provinsi/KIP Aceh dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk membahas proses pemutakhiran DPTB dan DKP serta penggunaan aplikasi Sidaih, c. Melakukan monitoring pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, di tingkat kabupaten/kota maupun pada Badan Penyelegara Pemilu Ad Hoc.
27	3357.033.001.051 Monitoring dan Evaluasi Pemilu	2	dokumen	66.479.000	0	0.00 %	0	Tahap Pelaksanaan : a. Melakukan monitoring terhadap setiap Tahapan Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU yang mengatur Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2019, di tingkat kabupaten/kota maupun pada badan penyelegara Pemilu Ad Hoc dan menyusun laporan hasil monitoring tersebut. b. Melakukan rapat kerja antara KPU Provinsi/KIP Aceh dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya terkait persiapan Pemilu. c. Dalam pelaksanaannya, Satker berkoordinasi dengan Bagian Monitoring dan Evaluasi pada Biro Perencanaan dan Data.
28	3357.032.001.051 Facilitasi Penyusunan Anggaran Pemilu	1	dokumen	63.915.000	0	0.00 %	0	Tahapan Kegiatan : a. Menyusun strategi pelaksanaan tahapan program dan jadwal Pemilu Tahun Anggaran 2019. b. Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemilu, di lingkungan KNUDPP Kabupaten/Kota sampai tingkat Badan Penyelegara Pemilu Ad Hoc. c. Melakukan koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Instansi terkait. d. Melaporkan hasil kegiatan ke KPU melalui KPU Provinsi/KIP Aceh sebagai mesukan untuk peningkatan kualitas tahapan, program dan jadwal penyelegaraan Pemilu.

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI			KETERANGAN
					ANGGARAN	FISIK	KINERJA TOTAL	
29	3357.026.001.051 Analisis capaian kinerja	8		4.784.000	0 0,00 %	0 0,00 %	0,00 %	Pelaksanaan Tahap Pelaksanaan a. KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun matrix rencana pelaksanaan kegiatan setiap bulan berdasarkan DIPA dan TOR. b. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun evaluasi pelaksanaan matrix rencana aksi pelaksanaan kegiatan setiap triwulan. c. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menentukan output dari triwulan I sampai dengan triwulan IV berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. d. KBU, KBU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaporkan capaian keuangan dan output serta kendala tidak tercapainya target kesanggupan dan risik berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan senilai bulan dan melakukan pemantauan setiap triwulan. e. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaporkan progres persentase dan capaian output dan kendala tidak tercapainya target berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. f. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran. g. Dalam pelaksanaannya. Satker berkordinasi dengan Biro yang menangani bidang monitoring dan evaluasi pada Sekretariat Jenderal KPU.

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN			REALISASI			KINERJA TOTAL	STATUS	STATUS PELAKUANAN	
					Kilometer	Realisasi	FISK.	Kilometer	Realisasi	FISK.				
30	3937.004.001.051 Rencana Aksi Pelaksanaan dan Percepatan Penyelenggaraan Anggaran	2		5.602.000	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Pelaksanaan	Tahap Pelaksanaan a. KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh menyusun matiks rencana aksi pelaksanaan kegiatan setiap bulan berdasarkan DIPA dan TDA. b. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun evaluasi pelaksanaan matiks rencana aksi pelaksanaan kegiatan setiap triwulan. c. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menentukan output dari triwulan I sampai dengan triwulan IV berdasarkan ketertujuan peraturan perundang-undangan. d. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaporkan capaian keuangan dan output serta kendala tidak tercapainya target keuangan dan fisk. berdasarkan ketertujuan peraturan perundang-undangan setiap triwulan dan melakukan pemantauan setiap triwulan. e. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaporkan progres persentase dan capaian output dan kendala tidak tercapainya target berdasarkan ketertujuan peraturan perundang-undangan. f. KPU (satu) hari setiap akhir bulan (berdasarkan output pelaksanaan kegiatan). f. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran. g. Dalam pelaksanaannya, Satker berkoordinasi dengan Biro yang menangani bidang monitoring dan evaluasi pada Sekretariat Jenderal KPU.	
31	3937.003.001.051 Layanan Teknologi Informasi	12		34.200.000	2.788.632	8.15 %	1	8.31 %	1	8.24 %	8.24 %	Pelaksanaan	Tahapan Kelelahan : a. KPU Kabupaten melaksanakan pindjadaan layanan internet b. KPU Kabupaten/Tanaman Mengangkat 1 (satu) orang operator pengelola Website KPU/KIP Kabupaten/Kota (admin) yang bertugas untuk mengelola seluruh situs KPU/KIP Kabupaten/Kota, melakukann pemeliharaan, dan monitoring jaringan LAN lainnya.	

NO	NOMENKLATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	ANGGARAN			KINERJA TOTAL	Status	REALISASI	STATUS PELAKUKAN
					Realisasi	Kinerja	FISK				
32	3357.001.001.052 penyusunan rencana kerja anggaran	1		100.843.000	8.025.000	7.96 %	0	0.00 %	3.98 %	Pelaksanaan	Penyelesaian Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020 a. melakukann penyelesaian rencana kerja KPU Tahun Anggaran 2019 berdasarkan KPK 2020; b. melakukan pencermatan atas kebutuhan dasar, yaitu belanja operasional pegawai dan belanja operasional kantor; c. melakukan identifikasi kebutuhan biaya yang tidak tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Miskum; d. melakukan koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi/KPK Aceh, dan instansi terkait dalam penyelesaian rencana kerja; dan e. memberikan masukan kepada KPU terkait rencana kerja KPU Tahun Anggaran 2020 melalui KPU Provinsi/KPK Aceh Pengelolaan Program dan Kegiatan serta Anggaran Tahun Anggaran 2019 Seluruh Satker KPU melakukan pencermatan, pengelahan, dan pendayagunaan anggaran yang ada untuk melaksanakan kegiatan KPU, baik kognitif ruin maupun lamaikan pemilu. Apabila diperlukan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat melakukan revisi anggaran sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Persyaritan Penyelesaian Anggaran Perubahan Serentak 2020 Penyelesaian dan Tahapan Pelayanan Kegiatan KPU/KIP Kabupaten/Kota pelaksana Perubahan 2018 berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TARD) setempat terkait penyelesaian usulan kebutuhan anggaran Perubahan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, KPK/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan KPU Provinsi/KPK Aceh guna membahtas kemungkinan adanya cost sharing budget
33	3356.015.001.051 Sarana dan Prasarana Koperasi Pemilu	1			21.725.000	0	0.00 %	0	0.00 %	Selesai	Kegiatan ini dilakukan untuk menampung pembayaran kegiatan yang telah dibayarkan sebelum adanya penyelesaian keluaran (output) 3356.016 Ketersejahteraan Logistik Pemilu

NO	NOMER KELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI				Keterangan
					ANGGARAN	KINERJA	FSK	KINERJA TOTAL	
34	3356.014.001.051	1		2.294.000	0	0.00 %	0	0.00 %	Kegiatan ini dilakukan untuk menampung pembayaran kognatan yang telah dibayarkan sebelum adanya penyesuaian kelayaran (output) 3356.016 Ketersediaan Logistik Pemilu
35	3356.008.001.051	1		6.900.000	0	0.00 %	0	0.00 %	Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan evaluasi pengelolaan logistik Pemilu 2019 di tingkat KPUD/KP Kabupaten/Kota, yang selanjutnya menghadirkan kegiatan evaluasi pengelolaan logistik Pemilu 2019 di tingkat KPUD/KP Provinsi/KP Aceh. Pelaksanaan kegiatannya adalah KPUD/KP Kabupaten/Kota menghadiri rapat evaluasi pengelolaan logistik Pemilu 2019 (fullday dan halfday meeting) di tingkat provinsi. Evaluasi pengelolaan logistik Pemilu 2019 dilakukan pada seluruh tahapan pengelolaan logistik Pemilu 2019, mulai dari perencanaan, pengadaan, pendistribusian, serta tata kelola pemeliharaan dan inventarisasi Logistik Pemilu 2019. Satker akan diminta untuk menyempurnakan data dan informasi berasal laporan yang menggambarkan pelaksanaan kegiatan, capaian, serapan anggaran, permasalahan yang dihadapi, solusi yang ditempuh, serta rumusan rekomendasi
36	3355.994.001.001	12		2.492.384.000	344.144.901	13.61 %	1	8.33 %	Dipergunakan untuk pembayaran honorarium yang kebutuhan Anggota KPUD, gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) KPUD, dan tunjangan-kunjungan PNS KPUD/pegawai organik dan pegawai yang diperlukan dan Pemerintah Daerah

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI			KINERJA TOTAL	Status	Keterangan	STATUS PELAKUAN
					ANGGARAN	FISK	KINERJA				
Realisasi	Realisasi	Kinjija									
37	3355.009.001.051 Pengelolaan Keuangan, Perpendidikan dan Pengembangannya Tahapan Pemilu	1	Laporan	75.067.000	265.999	0,35 %	0	0,00 %	0,16 %	Pelaksanaan	a. Menghadiri rapat koordinasi evaluasi petunjuk teknis yang diadakan oleh KPUD, b. Mensosialisasikan aturan atau peraturan teknis terkait pengisian, pertindahnaaraan, laporan keuangan, dan pertanggungjawaban tahanan Pemilu kepada Satker di Wilayah kerjanya. c. Mengabsorbsi koordinasi terkait penyelesaian permasalahan pertanggungjawaban keuangan Pemilu bagi Satker di Wilayah kerjanya. d. Menghadiri rapat monitoring/evaluasi penyusunan laporan keuangan terkait dana Pemilu. e. Mengadakan rapat monitoring/evaluasi laporan keuangan terkait data lahan Pemilu 2019. f. Melakukan monitoring ke KPUI/KIP Kabupaten/Kota terkait data laporan keuangan Pemilu 2019. g. Menyusun laporan Kelompok Kerja.
38	3355.007.001.051 Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1		8.816.000	0	0,00 %	0	0,00 %	0,00 %	Pelaksanaan	Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum atau keputusan terbaru dan disampaikan melalui simonikaV2/kpu.go.id.
39	3355.005.001.051 Petunjuk Kerangka dan Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan KPUD	1		8.496.000	715.000	8,42 %	0	0,00 %	4,21 %	Pelaksanaan	Tahapan Kegiatan : a. Melakukan analisa kelayakan terhadap rancangan biaya kiegatan tahapan Pemilu, b. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti DPD/Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Daerah sejingga tercapainya kesepakatan Nasional Penyajian Hasil Daerah (NHOD). c. Menghadiri, memberi masukan, dan menyampaikan permasalahan pada rapat koordinasi terkait ribuan Pemilih yang rencananya akan diadakan di Jakarta. d. Memelihara dokumen sumber.
40	3355.003.001.051 Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	1		28.268.000	1.250.000	4,42 %	1	100,00 %	52,21 %	Pelaksanaan	Penyusunan Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI			KETERANGAN
					BUDGET	Kinerja	FISK	
					BLGRBNS	- Realisasi	Kinerja	
41	3364.051.001.051 Relsawan Demokrasi	1	satker	414.550.000	0	0.00 %	0	KBL Kabupaten Tangerang membentuk dan memfasilitasi kegiatan pendidikan pemilih oleh relawan demokrasi untuk peningkatan partisipasi pemilih
42	3364.054.001.051 Pemungutan Suara	1		-4.000.000	0	0.00 %	0	Kegiatan ini dilakukan untuk menampung pembayaran kagiatan yang telah dilakukan sebelum adanya penyelenggaraan keluaran (output) 3364.058 Keterwujudan Suara Pemilih Hasil Pemilih
43	3356.016.001.051 Pengelolaan Logistik Pemilu	1	unit	33.298.000	0	0.00 %	0	Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengelolaan logistik Pemilu 2019 baik pada tahap perencanaan kebutuhan dan penganggaran logistik Pemilu 2019, tahap pengadaan dan pendistribusian serta tahap tata kela pemeliharaan dan inventaris logistik Pemilu 2019. Peningkatan kegiatan sebagaimana dijelaskan, selain koordinasi ke tingkat Pusat juga melakukn koordinasi ke tingkat Kabupaten/Kota. Untuk mencapai output kegiatan (target sasaran) tersebut, dilakukan kegiatan dengan tahapan sebagai berikut: a. KBL/KUP Kabupaten/Kota mengadiri undangan Rapat Koordinasi bidang Logistik di Jakarta, seluruh personil orang yang datang dalam surau kegiatan tersebut, dilakukan Kabupaten/Kota menyusun laporan pelaksanaan kegiatan

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI			KETERANGAN
					ANGGARAN	KINERJA	FSIK	
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Kinergia	
44	3356.016.001.052 Penyeadaan Logistik Pemilu	1	unit	1.086.625.000	0	0.00 %	0	0.00 % Kegiatan ini digunakan untuk membayar honor perjaya gudang, jasa pengelokan dan pendistribusian logistik sampai ke titik TPS. Untuk mencapai output kgiatan tersebut dilakukan kegiatan dengan tahapan sebagai berikut: a. Merekrut petugas perjaya gudang yang berugas mengawasi dan menjaga gudang logistik yang digunakan untuk menyimpan logistik kperiment Pemilu 2019. b. Melakukan proses pengelolaan logistik berupa sortir/pipa, pengelakan logistik, distribusi logistik dari KPU Kabupaten/kota hingga ke TPS, dan kegiatan dasungan lainnya. c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penggabduan dimaksud kepada Pimpinan, d. menyampaikan logistik Pemilu dengan aman di Gudang penyimpanan yang tersedia. e. mengekola logistik Pemilu sesuai dengan alokasi kebutuhan dan jumlah yang ditetapkan oleh KPU. f. mendistribusikan logistik pemilu dan satker KPU/KIP Kabupaten/Kota hingga TPS, dan sebaliknya sebagaimana ketersediaan anggaran zisias masing - masing satker. g. Melakukan pengembangan Salinan DRH sesuai ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku
45	3357.046.001.051 Pembentukan Badan Adhoc	1	badan adhoc	1.690.000	0	0.00 %	0	0.00 % Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan a. Melakukan PAW apabila terjadi perubahan Keanggotaan PPK, PPS dan KPS; b. Melakukan evaluasi terhadap Pembentukan dan Tata Kerja Badan Penyelegara Pemilu Adhoc Tahun 2019; dan c. Melaporkan hasil evaluasi dimaksud kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.
46	3357.046.001.052 Fasilitasi dan operasional PPK	10	PPK	713.633.000	112.500.000	15.76 %	10	100.00 % Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan : a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melakukan kegiatan Tahapan Pemilu 2019 sesuai dengan perundangundangan, Peraturan KPU dan Keputusan KPU serta arahan melalui Surat Ketua KPU terkait Pemilu 2019; dan b. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahapan pada PPK.

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI					Keterangan
					Anggaran	Realisasi	FISIK	KINERJA	TOTAL	
47	33357.046.001.053 Fasilitasi dan operasional PPS	133	PPS	4,707,820,000	653,700,000	13.84 %	133	100.00 %	56.92 %	Selesai  Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan : a. Panitia Penyelenggara Suara (PPS) melaksanakan kegiatan Tahapan Pemilu 2019 sesuai dengan perundangundangan, Peraturan KPU dan Keputusan KPU serta arahan melalui Surat Ketua KPU Terkait Pemilu 2019; dan b. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahapan pada PPS.
48	33357.046.001.054 Operasional KPPS	1544	KPPS	10,763,224,000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Selesai  Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan : a. Kelompok Penyeleenggaran Penyelenggara Suara (KPPS) melaksanakan kegiatan Tahapan Pemilu 2019 sesuai dengan perundangundangan, Peraturan KPU dan Keputusan KPU serta arahan melalui Surat Ketua KPU Terkait Pemilu 2019; dan b. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun Laporan Pembentukan dan Pelaksanaan Kegiatan Tahapan pada KPPS.
49	33364.057.001.051 Fasilitasi Calon Anggota DPRD KabPro	16	orang	100,000,000	0	0.00 %	0	0.00 %	0.00 %	Pelaksanaan  Melaksanakan koordinasi dengan pihakinstansi terkait dalam memfasilitasi tata cara penetapan terpilih. Wujud nyata Kegiatan ini, dapat berupa bimbingan teknis kepada pada Calon Terpilih agar mereka memahami bagaimana mekanisme KPU dalam menerapkan Calon Terpilih.

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	VOL	SATUAN	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI			KETERANGAN
					ANGGARAN	Realisasi	FISK	
					Kinerja	Berbasis	Kinerja	
50	3364.058.001.051 Penyengutan Suara	1	Suara	426.526.000	2.000.000	0.47 %	0	0.00 %
								Pelaksanaan kegiatan : 1. Menyelenggarakan bimbingan teknis terkait proses pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi suara Pemilu dan Pilpres 2019. 2. Mengikuti kegiatan bimbingan teknis penggunaan aplikasi penghitungan suara Pemilu dan Pilpres 2019 atau dikenal dengan Situng 3. Melakukan uji coba terhadap penggunaan aplikasi Situng Pemilu 2019. 4. Memantau proses pemungutan dan penghitungan suara oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, agar dapat mengantisipasi sejak dini permasalahan dan kendala yang dihadapi. Permantauan ini dibentuk dengan melibatkan instansi terkait dalam penyelegaraan Pemilu agar transparan dan adil. Keterlibatan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk tim Pokja atau negation lain yang lebih efektif.
51	3364.058.001.052 Rekapitulasi dan Penghitungan Suara	1	Suara	925.772.000	0	0.00 %	0	0.00 %
								Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Nasional Suara Pemilu dan Pilpres 2019 Kegiatan ini dilaksanakan untuk melaksanakan proses rekapitulasi hasil penghitungan Nasional di tingkat Kabupaten/Kota. Kegiatan rekapitulasi diakomodir di kantor KPU/KIP Kabupaten/Kota atau di tempat lain yang memadai, memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada pada kegiatan dimaksud. Koordinasi dengan pihak Pemda ataupun lainnya dalam menggunakan fasilitas untuk kegiatan rekapitulasi sangat penting dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
52	3364.058.001.053 Penetapan Hasil Pemilu	1	Suara	242.165.000	125.535.000	51.84 %	0	0.00 %
								Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan : a. Meryakupkan administrasi dan kelengkapan lainnya terkait pelaksanaan kegiatan. b. Menyiapkan tempat, akomodasi dan konsumsi untuk pelaksanaan kegiatan. c. Melaksanakan kegiatan proses penetapan hasil suara Pemilu 2019 dan penetapan hasil suara Anggota Legislatif. d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan.

## REKAP PERMASALAHAN KOMPONEN

No	Nomenklatur Komponen	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
1	<b>3364.052.001.051</b> Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	1	kegiatan	Tidak Ada Masalah,	
2	<b>3364.050.001.051</b> Sosialisasi Penyelegaraan Pemilu	1	kegiatan	Tidak Ada Masalah,	
3	<b>3364.049.001.051</b> Supervisi/Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelegaraan Pemilu	1	kegiatan	Tidak Ada Masalah,	
4	<b>3364.047.001.051</b> Kampanye Pemilih Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD	1	laporan	Tidak Ada Masalah,	
5	<b>3364.043.001.051</b> Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terseleksi Pemilu	16		Tidak Ada Masalah,	
6	<b>3364.032.001.052</b> Pembentukan Rumah Pintar Pemilu	1		Tidak Ada Masalah,	
7	<b>3364.030.001.052</b> Analisis Hasil Pengolahan Data dan Evaluasi Sistem Pemilu dan Pilkada	1		Tidak Ada Masalah,	
8	<b>3364.006.001.051</b> Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	1		Tidak Ada Masalah,	
9	<b>3364.005.001.051</b> Publikasi Informasi Pemilu	1		Tidak Ada Masalah,	
10	<b>3364.004.001.051</b> Kordinasi PAW Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1		Tidak Ada Masalah,	
11	<b>3364.003.001.051</b> Sosialisasi Penyelegaraan Pemilu	1		Tidak Ada Masalah,	
12	<b>3364.001.001.051</b> Rancangan Pedoman/Juknis Penyelegaraan Pemilu dan Pemilkada	1		Tidak Ada Masalah,	
13	<b>3363.020.001.051</b> Bantuan hukum penyelesaian kasus hukum pemilu	1	kasus	Tidak Ada Masalah,	

No	Nomenklatur Komponen	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
14	<b>3363.019.001.051</b> Dana Kampanye Pemilu	1	Laporan	Tidak Ada Masalah,	
15	<b>3363.018.001.051</b> Peraturan/Keputusan KPU Pemilu	1	Rancangan	Tidak Ada Masalah,	
16	<b>3363.010.001.051</b> Advokasi dan Bantuan Hukum	1		Tidak Ada Masalah,	
17	<b>3361.005.001.051</b> Reviu Laporan Keuangan KPU Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	1		Tidak Ada Masalah,	
18	<b>3361.004.001.051</b> Evaluasi LAKIP	1		Tidak Ada Masalah,	
19	<b>3360.994.001.002</b> Operasional dan Pereliharaan Kantor	12		Tidak Ada Masalah,	
20	<b>3360.024.001.051</b> Penyusunan BMN Logistik Pemilu	1	Dokumen	Tidak Ada Masalah,	
21	<b>3360.023.001.051</b> Facilitasi keamanan Pemilu	12	layanan	Tidak Ada Masalah,	
22	<b>3360.010.001.051</b> Pengelolaan Barang Milik Negara	1	Dokumen	Tidak Ada Masalah,	
23	<b>3360.009.001.051</b> Pengelolaan Barang Milik Negara	1		Tidak Ada Masalah,	
24	<b>3357.041.001.051</b> Facilitasi Pemilih Pemungutan Suara (PPS)	1		Tidak Ada Masalah,	
25	<b>3357.040.001.051</b> Facilitasi Pemilih Pemungutan Kecamatan (PPK)	1		Tidak Ada Masalah,	
26	<b>3357.034.001.051</b> Pemutakhiran data Pemilih Pemilu	1	dokumen	Tidak Ada Masalah,	
27	<b>3357.033.001.051</b> Monitoring dan Evaluasi Pemilu	2	dokumen	Tidak Ada Masalah,	

No	Nomenklatur Komponen	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
28	<b>3357.032.001.051</b> Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pemilu	1	documento	Tidak Ada Masalah,	
29	<b>3357.026.001.051</b> Analisis capaian kinerja	8		Tidak Ada Masalah,	
30	<b>3357.004.001.051</b> Rencana Aksi Pelaksanaan dan Percepatan Penyerapan Anggaran	2		Tidak Ada Masalah,	
31	<b>3357.003.001.051</b> Layanan Teknologi Informasi	12		Tidak Ada Masalah,	
32	<b>3357.001.001.052</b> Penyusunan rencana kerja anggaran	1		Tidak Ada Masalah,	
33	<b>3356.015.001.051</b> Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu	1		Tidak Ada Masalah,	
34	<b>3356.014.001.051</b> Fasilitasi Pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan pengadilan, pendistribusian dan pengelolaan administrasi	1		Tidak Ada Masalah,	
35	<b>3356.008.001.051</b> Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pilkada	1		Tidak Ada Masalah,	
36	<b>3355.994.001.001</b> Gaji dan Tunjangan	12		Tidak Ada Masalah,	
37	<b>3355.009.001.051</b> Pengelolaan keuangan, perbedaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu	1	Laporan	Tidak Ada Masalah,	
38	<b>3355.007.001.051</b> Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1		Tidak Ada Masalah,	
39	<b>3355.005.001.051</b> Petunjuk Keuangan dan Laporan Permasalahan Pengelolaan Keuangan KPU	1		Tidak Ada Masalah,	
40	<b>3355.003.001.051</b> Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	1		Tidak Ada Masalah,	
41	<b>3364.053.001.051</b> Relawan Demokrasi	1	satker	Tidak Ada Masalah,	

No	Nomenklatur Komponen	Vol	Satuan	Permasalahan	Keterangan
42	3364.054.001.051 Pemungutan Suara	1		Tidak Ada Masalah,	
43	3356.016.001.051 Pengelolaan Logistik Pemilu	1	unit	Tidak Ada Masalah,	
44	3356.016.001.052 Penyediaan Logistik Pemilu	1	unit	Tidak Ada Masalah,	
45	3357.046.001.051 Pembentukan Badan Adhoc	1	badan adhoc	Tidak Ada Masalah,	
46	3357.046.001.052 Facilitasi dan operasional PPK	10	PPK	Tidak Ada Masalah,	
47	3357.046.001.053 Facilitasi dan operasional PPS	133	PPS	Tidak Ada Masalah,	
48	3357.046.001.054 Operasional KPPS	1544	KPPS	Tidak Ada Masalah,	
49	3364.057.001.051 Facilitasi Calon Anggota DPR, DPRD Kab/Pro	16	orang	Tidak Ada Masalah,	
50	3364.058.001.051 Pemungutan Suara	1	suara	Tidak Ada Masalah,	
51	3364.058.001.052 Rekapitulasi dan Penghitungan Suara	1	suara	Tidak Ada Masalah,	
52	3364.058.001.053 Penetapan Hasil Pemilu	1	suara	Tidak Ada Masalah,	





Kementerian PPN/  
Bappenas

**Kedepitan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan  
Kementerian PPN/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)**